



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KETAPANRAME BERBASIS PENTAHELIX

Delima Simbolon¹, Re Aprilia Saribulan², Bintang Laksono³, Moh. Musleh⁴, Agus Subianto⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang tuah, Surabaya

Corresponding: musleh.mohammad@hangtuah.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 14 November 2024

Revised date: 26 November 2024

Accepted date: 8 Januari 2025

ABSTRACT

Ketapanrame tourism village is part of a well-managed BUMdes business unit that has received many awards. This article discusses the implementation of the pentahelix method in the context of the development of the tourism village and highlights the achievements and identifies the challenges that emerged in the development of Ketapanrame tourism village. This qualitative research adopts a case study approach and describes the interaction with five stakeholders, namely 1) Academics, 2) Business, 3) Community, 4) Government and 5) Media, in accordance with the Pentahelix model by Arief Yahya (2016). Qualitative methods were used in this study, and data collection techniques were conducted through observation, interviews, and document review. The results of this study show that the Ketapanrame Village-Owned Enterprise (BUMDes) has implemented a strategy that focuses on developing tourism destinations optimally and has been running well as evidenced by the achievements it has made and the active participation of various stakeholders as well as strong support from the local community and effective synergy between BUMDes, local government, academics, business people, and the media in overcoming various challenges faced in the development of Ketapanrame Tourism Village.

Keywords: Tourism village, Pentahelix, Stakeholders, Ketapanrame

ABSTRAKSI

Desa wisata ketapanrame merupakan bagian dari unit usaha BUMdes yang berhasil dikelola dengan baik dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Dalam pengembangan desa wisata, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. artikel ini membahas pelaksanaan metode pentahelix dalam konteks pengembangan desa wisata tersebut dan menyoroti pencapaian serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pengembangan Desa wisata Ketapanrame. Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus dan menggambarkan interaksi bersama lima pemangku kepentingan, yakni 1) Academics, 2) Business, 3) Community, 4) Government and 5) Media, sesuai dengan model Pentahelix oleh Arief Yahya (2016). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame telah menerapkan strategi yang berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata secara optimal dan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan prestasi yang telah diraihinya dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan serta dukungan yang kuat dari masyarakat setempat dan sinergi yang efektif antara BUMDes, pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis, dan media dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame.

Kata Kunci: Pemangku kepentingan, Desa wisata, Pentahelix, Ketapanrame.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan daerah masih belum merata dan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang terus meningkat, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti kawasan pedesaan. Salah satu upaya awal pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan berbagai bentuk program dan inisiatif yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemerintah berharap bahwa dengan langkah-langkah ini, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di desa-desa yang masih tertinggal. Pemberlakuan otonomi daerah telah membawa Indonesia ke dalam era keterbukaan yang lebih luas, dimana akses partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan.

Dengan adanya otonomi daerah, beban pemerintah pusat dan provinsi berkurang, memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih strategis dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan sumber daya dan potensi daerah. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di desa-desa yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 81 menyatakan

bahwa pembangunan desa wajib melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang tersedia. Salah satu cara memanfaatkan kearifan lokal adalah melalui sektor pariwisata. Otonomi desa, sebagai bagian dari otonomi daerah, diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ardiana & Tjukup, 2018). Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan desa. Undang-Undang ini memberikan pengaruh besar pada status dan hubungan desa dengan masyarakat, memungkinkan pembangunan desa secara kolektif bersama pemerintah daerah, mencakup kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan demokrasi desa (Latifah N, Aziz L., 2016). Pemerintah berharap melalui Undang-Undang ini, desa dapat lebih mandiri dan mampu memaksimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi, desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan demokratis. Selain itu, potensi pariwisata yang dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi desa, mendukung perekonomian lokal, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata mencakup berbagai aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sayangnya, pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor pariwisata, menyebabkan penurunan jumlah perjalanan wisatawan domestik di Indonesia. Data dari Badan Pusat

Statistik menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang awalnya mencapai 772,16 juta pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 518,59 juta pada tahun 2020. Ini menunjukkan betapa rentannya sektor pariwisata terhadap gangguan global, dan menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekonomi desa untuk mempertahankan kestabilan dan kemakmuran komunitas lokal. Dengan memanfaatkan berbagai potensi lokal dan membangun sinergi antara berbagai pihak melalui model Pentahelix, Desa Ketapanrame diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan desa yang berkelanjutan dan inklusif (Tamianingsih T, Eprilianto D.F., 2022).

Desa Ketapanrame merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam berbagai aspek, baik dari segi sumber daya alam, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam upaya mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien melalui kerja sama berbagai pihak yang terlibat. Sinergitas stakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di desa ini. Desa Wisata Ketapanrame, yang terletak di antara keindahan alam yang luar biasa, memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata yang menarik. Dengan panorama alam yang memukau serta keberagaman budaya lokal, desa ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik dan menyeluruh. Desa Wisata Ketapanrame tidak hanya menonjol dengan pesona alamnya, tetapi juga dengan kearifan lokal dan aktivitas tradisional yang menjadi daya tarik utama. Mengembangkan desa wisata ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian lokal, melestarikan budaya, dan memastikan keberlanjutan lingkungan (Vani R.V, Priscilia S.O, Adianto A., 2022). Dengan potensi yang dimiliki, Desa Ketapanrame dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, serta dapat menginspirasi desa-desa lain untuk mengembangkan potensi lokal mereka. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat dan memperkuat identitas budaya lokal.

Desa Ketapanrame memanfaatkan potensi Tanah Kas Desa (TKD) untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan membangun Taman Ghanjaran dan mengembangkan wisata Sawah Sumber Gempong. Tujuan utama dari pengembangan desa wisata ini adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal serta menjaga kearifan lokal yang ada. Pembangunan wisata Taman Ghanjaran dan Sawah Sumber Gempong tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi penduduk setempat serta meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan. Keberhasilan proyek ini juga dapat menjadi model bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal dan sumber daya alam yang dimiliki. (Dewita Rahma Aisyah, 2024).

Pada akhir tahun 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame memperluas cakupannya dengan memasuki sektor pariwisata. BUMDes Ketapanrame kini mengelola lima unit usaha yang beragam. Unit-unit tersebut meliputi pengelolaan air minum, pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, pengelolaan kios dan kandang ternak, simpan pinjam dan kemitraan, serta unit wisata desa. Pada tahun 2020, BUMDes Ketapanrame berhasil meraih penghargaan sebagai BUMDes terbaik se-Jawa Timur. Prestasi ini menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola potensi wilayahnya secara mandiri.

Salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Ketapanrame adalah Wisata Taman Ghanjaran. Wisata ini dikembangkan untuk membuka peluang bagi kegiatan ekonomi kreatif dan mendukung pelaku usaha lokal. Wisata Taman Ghanjaran telah menjadi contoh pengembangan desa mandiri yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai tempat wisata. Dengan adanya

inisiatif ini, desa Ketapanrame tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan lingkungan.

Wisata Taman Ganjaran berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) seluas sekitar 2,8 hektar. Sebelum menjadi taman wisata, lahan tersebut adalah area pertanian yang dikelola oleh warga setempat. Namun, dari tahun ke tahun, hasil panen mengalami penurunan, dan pendapatan dari pengelolaan lahan ini tidak efisien untuk menambah pendapatan asli desa. Akibatnya, pengelolaan lahan ini terhenti. Pada tahun 2016, muncul ide dalam

musyawarah desa untuk mengubah lahan ini menjadi desa wisata. Perubahan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan dengan lebih produktif, menciptakan destinasi wisata yang menarik, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Dengan demikian, transformasi lahan pertanian menjadi kawasan wisata diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi contoh sukses bagi desa-desa lain yang ingin memanfaatkan potensi lokal mereka secara lebih optimal (Cahyaningrum N, & Tukiman T., 2022).

Tabel 1: Data Pendapatan BUMDES Ketapanrame

Tahun	Jumlah pendapatan
2019	771.160.625
2020	1.291.091.857
2021	1.940.822.488
2022	1.646.456.850
2023	3.462.071.146

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Ketapanrame.

Berdasarkan rekapitulasi data terlihat bahwa pendapatan BUMDes Ketapanrame mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pendapatan tercatat sebesar Rp 771.160.625. Angka ini meningkat menjadi Rp 1.291.091.857 pada tahun 2020, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 67,4%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan mulai beroperasinya unit usaha baru di sektor pariwisata, terutama dengan pengembangan Taman Ghanjaran dan wisata Sawah Sumber Gempong yang mulai menarik pengunjung. Meskipun pandemi COVID-19 mempengaruhi ekonomi global, termasuk sektor pariwisata, BUMDes Ketapanrame mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatannya hingga mencapai Rp 1.940.822.488 pada tahun 2021, meningkat sebesar 50,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun,

pada tahun 2022, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp 1.646.456.850, atau turun sebesar 15,2%, kemungkinan disebabkan oleh dampak jangka panjang pandemi, perubahan kebijakan pariwisata, atau kebutuhan investasi ulang untuk perbaikan infrastruktur. Pada tahun 2023, pendapatan melonjak tajam menjadi Rp 3.462.071.146, meningkat 110,3% dari tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan strategi pengembangan pariwisata, pembukaan kembali destinasi wisata, serta peningkatan promosi dan layanan. Prestasi sebagai BUMDes terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2020 memberikan dampak positif jangka panjang, meningkatkan reputasi desa dan menarik lebih banyak wisatawan serta investor.

Pengembangan wisata desa seperti Taman Ghanjaran dan Sawah Sumber Gempong telah memberikan dampak positif

signifikan terhadap ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan kearifan lokal. Transformasi lahan pertanian menjadi destinasi wisata membuktikan bahwa potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Desa Ketapanrame sebagai inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Salah satu strategi yang diusung oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah penerapan model Penta Helix. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan kemudian diresmikan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Model Pentahelix bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan mengoptimalkan peran bisnis, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media. Tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai tambah dalam kepariwisataan serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Maturbongs, E.E., 2020).

Dengan penerapan model Pentahelix, kolaborasi antara berbagai elemen menjadi lebih terstruktur dan efektif. Setiap elemen memiliki peran dan

kontribusi yang unik dalam mendukung pengembangan pariwisata. Bisnis dapat menawarkan inovasi dan investasi, pemerintah menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung, komunitas berperan dalam pelestarian budaya dan lingkungan, akademisi memberikan penelitian dan pendidikan, sedangkan media membantu dalam promosi dan penyebaran informasi. Sinergi dari semua elemen ini diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame. Peran yang dianalisis meliputi: 1) Partisipasi lembaga pendidikan dan akademisi dalam penyebaran pengetahuan; 2) Kegiatan kewirausahaan dan peran penyedia jasa; 3) Implementasi regulasi dan kebijakan oleh pemerintah; 4) Upaya branding destinasi dan promosi kearifan alam serta budaya lokal; 5) Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, Desa Wisata Ketapanrame dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan pariwisata yang memberdayakan masyarakat setempat dan melestarikan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menyelami realitas sosial Desa Ketapanrame secara mendalam. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan fakta yang ada di lapangan (Creswell, 2016). Metode ini dipilih untuk memahami kompleksitas interaksi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan desa wisata. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi ini strategis untuk memahami konteks lokal dan mengamati secara langsung dinamika pengelolaan desa wisata. Fokus utama penelitian ini adalah mengupas tuntas sinergitas stakeholder

berdasarkan teori model Pentahelix strategi ABCGM singkatan dari (Academic, Business, Community, Government and Media) menurut Arief Yahya (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, n.d.).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Wawancara: Peneliti akan melakukan percakapan mendalam dengan berbagai stakeholder, seperti perangkat desa, pelaku usaha wisata, tokoh masyarakat, dan akademisi. Wawancara ini memungkinkan penggalian informasi yang kaya dan mendalam tentang perspektif dan pengalaman mereka terkait pengelolaan desa

wisata. 2) Observasi: Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan desa wisata dilakukan. Observasi ini dapat dilakukan di berbagai lokasi, seperti Taman Ganjaran, Wisata Sawah Sumber Gempong, dan kantor BUMDes Ketapanrame. 3) Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen resmi desa, laporan kegiatan, dan pemberitaan media. Dokumentasi ini akan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam: Memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata berbasis sinergitas stakeholder., Mengembangkan model pentahelix yang lebih efektif untuk pengelolaan desa wisata di Indonesia, dan Memberikan rekomendasi

kebijakan yang tepat untuk mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data dan informasi dari berbagai informan kunci dan pendukung yang dipilih oleh peneliti berdasarkan variabel-variabel tertentu. Informan tersebut meliputi: 1) Pihak Akademis, seperti lembaga pendidikan UBAYA yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame; 2) Pihak Pelaku Usaha, termasuk pelaku UMKM dan pemandu destinasi wisata Ketapanrame; 3) Pihak Komunitas, yaitu Kelompok Sadar Wisata dan sopir destinasi wisata Ketapanrame; 4) Pihak Pemerintah, yaitu BUMDes dan Kepala Desa Wisata Ketapanrame; serta 5) Pihak Media, yang mencakup pengelola media sosial dan platform digital lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi pemerintah menjadi aspek krusial dalam konsep Pentahelix. Untuk mengembangkan potensi desa wisata ketapanrame konsep Pentahelix dianggap sangat penting dengan mengadopsi model

Pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government and Media.). berikut dijabarkan peran setiap stakeholders dalam pengembangan desa wisata ketapanrame.

Pemerintah (Government)

Pemerintah dalam model pentahelix berperan sebagai regulator yang memiliki fungsi membuat regulasi dan mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan (Slamet, dkk, 2017). Pemerintah juga terlibat dalam menyediakan akses dan infrastruktur untuk kepariwisataan, memfasilitasi sektor industri dan perdagangan, serta mendukung bidang pertanian. Selain menetapkan kebijakan, pemerintah memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan solusi guna mengatasi tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan desa wisata ketapanrame dengan mengalokasikan sumber anggaran untuk pembangunan desa wisata. Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah merupakan bagian dari fungsi alokasi pemerintah untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. hal tersebut disampaikan langsung oleh bapak Zainul Arifin selaku Kepala desa Ketapanrame. Adanya kebijakan mengenai desa wisata yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup pengembangan potensi desa, pengelolaan

sumber daya, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Selain dukungan dari pemerintah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi warga desa. Wisata yang ada di Desa Ketapanrame berada di bawah pengawasan dan pengelolaan unit wisata BUMDes. seperti BUMDes mengelola penyediaan air minum dengan memberikan subsidi kepada warga. Setiap bulan, warga hanya perlu membayar iuran sebesar 15.000 Rupiah, yang

mencakup biaya air sebesar 5.000 Rupiah dan kontribusi untuk pengelolaan sampah sebesar 8.000 Rupiah. BUMDes juga merencanakan program meterisasi untuk pemakaian air di perumahan, sehingga penggunaan air dapat terkontrol dan efisien. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana BUMDes berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui penyediaan layanan dasar yang terjangkau dan berkelanjutan. hal ini dipertegas oleh bapak Sujanarko (Pengawas BUMDes).



Foto bersama Pengawas Bumdes dan Kepala Desa Ketapanrame

Sumber: Penulis, 2024

Akademisi (Academic)

Akademisi sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam pembangunan pariwisata, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga

penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Keterlibatan pihak akademisi dalam pengembangan pariwisata pedesaan diimplementasikan dari riset terapan yang dilakukan di desa dalam usaha mendorong

pembangunan pariwisata (Oka et al., 2021). Dalam hal ini akademisi membuat dan melakukan suatu kegiatan dengan melihat dari teori-teori yang ada, pihak akademisi memberikan pengetahuan mengenai suatu konsep yang relevan yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herwanto Direktur BUMDes, dijelaskan bahwa akademisi dari berbagai universitas telah melakukan penelitian dan mendorong pengabdian melalui berbagai program untuk pengembangan desa wisata Ketapanrame. Para akademisi ini tidak hanya melakukan riset, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata desa, melibatkan masyarakat setempat, dan memberikan pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan. salah satu contoh nyata kontribusi akademisi dalam pengembangan pariwisata pedesaan adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Universitas Surabaya.

Universitas Surabaya (UBAYA) mengembangkan potensi wisata dan ekonomi warga Desa Ketapanrame, Mojokerto, melalui produk unggulan, festival budaya, dan layanan pariwisata Sumber Gempong. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Matching Fund 2021 yang berlangsung dari Agustus hingga Desember 2021, didanai oleh Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Ditjen Dikti Ristek. UBAYA memberikan pelatihan dan pengembangan produk unggulan, kesenian, serta melatih anak muda dalam mengelola desa wisata. Program ini melibatkan mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas di UBAYA, kepala desa, BUMDes, dan masyarakat Desa Ketapanrame. Hasil dari pelatihan ini ditampilkan dalam acara peresmian Wisata Sumber Gempong dan Festival Desa Berdaya yang dihadiri oleh Bupati Mojokerto pada Desember 2021. UBAYA berharap Sumber Gempong bisa menjadi destinasi wisata berkelanjutan dan berbasis komunitas (Uabaya.ac.id, 2021).

Gambar 2.

Foto stakeholder yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame termasuk UBAYA

Sumber: Penulis, 2024

Pelaku Usaha (Business)

Sektor swasta pada model Pentahelix berperan sebagai enabler. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan

sebagai enabler menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Objek wisata yang menarik pada Desa Wisata Ketapanrame menjadi peluang bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan menjadi pebisnis atau pengusaha. Bisnis

dibidang pariwisata cukup ramai, hal tersebut dipengaruhi oleh peran media sosial dalam mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata yang ada. Dengan demikian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berbisnis di bidang pariwisata. Produk bisnis yang dapat dikembangkan dalam hal ini, jasa yang dapat diberikan kepada konsumen, seperti objek wisata sebagai produk utama yang ditawarkan, transportasi (tour & travel penyedia tiket pesawat, rental kendaraan / penyedia transportasi), pemandu wisata (pemilik usaha dapat mempekerjakan masyarakat sekitar untuk menjadi pemandu wisata), akomodasi atau penginapan, dan usaha kuliner, serta jasa atau produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan wawancara dengan ibu amila (pelaku UMKM) dengan adanya Desa Wisata Ketapanrame membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang menjual kuliner dan jajanan khas Desa Wisata Ketapanrame yang kemudian dapat dinikmati para wisatawan.

Hal tersebut merupakan daya tarik bagi para wisatawan. Selain itu, adanya homestay, kerajinan tangan khas Desa Wisata Ketapanrame, serta pemandu wisata juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa wisata tersebut.

Sebagai seorang pebisnis, informan menyebutkan bahwa desa wisata memiliki peluang besar untuk menjalin kerjasama dengan pelaku usaha guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan peluang bisnis dengan menciptakan kerajinan tradisional yang dapat dijadikan sebagai souvenir bagi para pengunjung. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan para pelaku bisnis tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang berkembang. Upaya ini juga dapat membantu melestarikan budaya lokal melalui pembuatan kerajinan tradisional yang bernilai jual tinggi.

Gambar 3.

Foto bersama ibu amila (pelaku UMKM di Sumber Gempong)

Sumber: Penulis, 2024

Komunitas (Community)

Aktor lain yang berperan dalam kepariwisataan adalah komunitas. Komunitas dalam kajian ini didefinisikan sebagai masyarakat setempat dalam artian luas.

Pemerintah desa dan masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam pengembangan desa wisata. Peran dari masyarakat diperlukan untuk penunjang keberhasilan

desa wisata (Wahyuni, 2018). Kinerja pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dapat diukur dari hasil, manfaat, dan dampak yang diberikan kepada masyarakat (MUKMIN et al., 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kholidun (sopir di Desa Wisata Ketapanrame) menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat positif bagi Desa Wisata Ketapanrame. Selain menguntungkan desa wisata, hal tersebut tentu juga menguntungkan masyarakat desa wisata. Masyarakat diberdayakan dengan ikut serta dalam pengelolaan desa wisata seperti menjadi supir pemandu wisata. Meskipun demikian, optimalisasi peran masyarakat masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya akses bagi sopir lokal dalam menarik wisatawan karena adanya persaingan dengan transportasi dari luar daerah desa wisata. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan keuntungan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata.

Idealnya, manfaat dari pembangunan desa wisata harus dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, jika pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong telah mencapai kestabilan, perlu untuk menambah sektor wisata yang melibatkan masyarakat setempat agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Pemanfaatan yang merata ini juga akan mendorong

masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang akan datang (Hajar et al., 2018).

Untuk memastikan kesejahteraan dan pemerataan manfaat, strategi-strategi tambahan harus diterapkan. Misalnya, pengembangan kegiatan pariwisata yang spesifik bagi setiap dusun, pelatihan keterampilan untuk masyarakat setempat, dan peningkatan akses terhadap sumber daya pariwisata. Dengan demikian, tidak hanya satu sektor yang berkembang, tetapi seluruh desa dapat merasakan dampak positif dari pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata juga akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga keberlanjutan dan kesuksesan desa wisata dapat terjamin. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup program-program pelatihan untuk masyarakat lokal dalam bidang perhotelan, pemanduan wisata, dan kewirausahaan, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah desa dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap elemen masyarakat dapat turut serta dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang harmonis dan sejahtera.

Gambar 4.

Foto bersama Bapak. Kholidun (sopir angkot di Desa Wisata Ketapanrame)

Sumber: Penulis, 2024

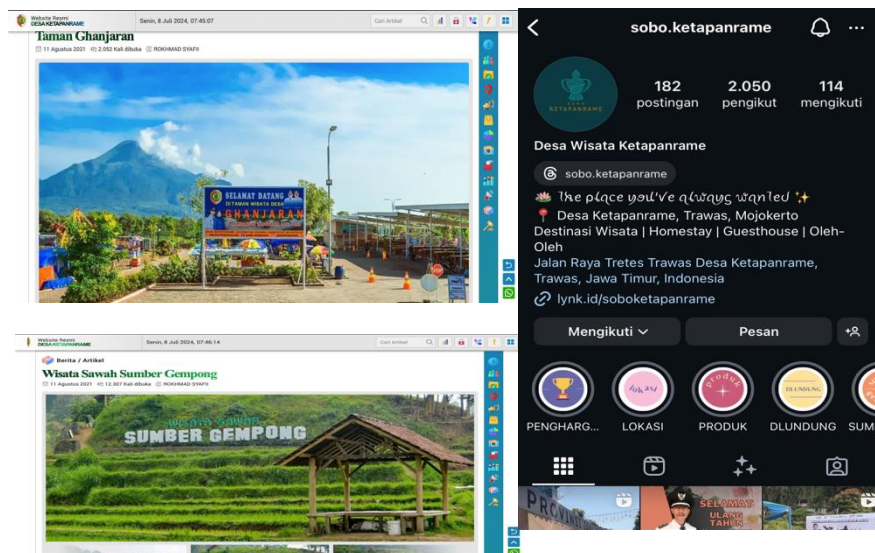
Media

Media (media) berperan sebagai expender. Media berperan dalam mendukung publikasi dan promosi serta membentuk citra merek dalam sebuah program melalui website atau media lainnya sebagai sarana promosi dan informasi untuk mengembangkan pariwisata dan memainkan peran penting dalam mempromosikannya (Rochaeni. dkk, 2022).

Salah satu aktor dalam pengembangan pariwisata adalah media massa. Media massa sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai link penghubung antara pemerintah dan masyarakat Howlett dan Ramesh dalam (Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, 2020). Media massa dalam kehidupan modern saat ini, terus mengalami perkembangan yang pesat. Awalnya kita hanya mengenal media massa terbagi antara media cetak seperti surat kabar, majalah dan media cetak lainnya, serta media elektronik berupa siaran televisi dan radio. Sedangkan di masa kini seiring berkembangnya teknologi dan internet, maka munculnya media baru yaitu media sosial seperti facebook, instagram, twitter (X), youtube dan lainnya. Kemampuan media massa yang dapat menyebarkan informasi tanpa dibatasi dimensi ruang dan waktu inilah, yang dimanfaatkan dalam sektor pariwisata termasuk dalam memasarkan produk dari desa wisata.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herwanto (Direktur BUMdes) bahwasanya Desa Wisata Ketapanrame menggunakan media sosial sebagai alat media promosi. Pada Desa Wisata Ketapanrame media sosial yang digunakan antara lain melalui instagram dan website. Desa wisata terletak di kawasan pedesaan yang cukup jauh dari hiruk pikuk globalisasi, namun promosi pengembangan desa wisata tidak boleh ketinggalan jaman. Promosi konvensional desa wisata tidak bisa terlalu diandalkan. Internet-lah yang menjadi pemeran utama untuk promosi desa wisata. Selain itu, Pengelola harus memiliki website yang representatif dan informatif.

Tidak hanya itu saja, media massa dari platform digital dari pihak luar juga berkolaborasi dalam mempromosikan Desa Wisata Ketapanrame, seperti Radar Mojokerto, IDN Times Jatim, CNN Indonesia, dan platform digital lainnya. Desa Wisata Ketapanrame menggunakan media sosial dan platform digital dari pihak luar sebagai alat untuk mempromosikan keunggulan desa wisata tersebut. Kolaborasi ini membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik desa wisata, memanfaatkan keunggulan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama. Dengan pendekatan ini, desa wisata dapat lebih efektif dalam menjangkau wisatawan potensial dan memperluas dampak ekonomi serta sosial bagi masyarakat lokal.





Gambar 5.

Foto bersama Direktur Bumdes dan Media promosi Desa Wisata Ketapanrame

Sumber: Penulis, 2024

KESIMPULAN

Model Pentahelix telah berhasil mengorganisir kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Peran unik dari setiap elemen, seperti bisnis, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media, telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame. Identifikasi kontribusi berbagai pemangku kepentingan, seperti partisipasi lembaga pendidikan, kegiatan kewirausahaan, implementasi regulasi pemerintah, branding destinasi, dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata. Melalui sinergi stakeholder, Desa Wisata Ketapanrame dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan pariwisata yang tidak hanya memberdayakan masyarakat setempat tetapi juga melestarikan lingkungan.

Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk

lembaga pendidikan, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media, dalam pengelolaan Desa Wisata Ketapanrame. Selain itu, penting untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat guna meningkatkan keterlibatan dan manfaat bagi mereka, serta menyusun strategi yang merata dalam pembagian manfaat pembangunan desa wisata untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Diperlukan juga upaya terus-menerus dalam memperkuat sinergi antar stakeholder dengan memanfaatkan model Pentahelix ABCGM dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Desa Wisata Ketapanrame dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang memberdayakan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. 2018. Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 6(02), 1–18.

Cahyaningrum N, Tukiman T. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *J Ilm Univ Batanghari Jambi*. 2022;22(2):1133. doi:10.33087/jiubj. V22i2.2328

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dewita Rahma Aisyah. *Manajemen Potensi Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto*. Published 2024. <https://mahasiswa.co.id/manajemen-potensi-desa-wisata-ketapanrame-kecamatan-trawas-kabupaten-mojokerto/5006/>
- Fauzi, A. A., Harto, B., Mulyanto., & Wulandari, R. (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Latifah N, Aziz L. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa the Village Autonomy and the Effectiveness of Village Fund*. *J Penelit dan Polit*. Published online 2016:193-211. <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>,
- Maturbongs EE. *Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke*. *Transparansi J Ilm Ilmu Adm*. 2020;3(1):55-63. doi:10.31334/transparansi. V3i1.866
- Mukmin, Z., Ruslan, R., & Kurniati, S. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 106–111. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p106>
- Oka, I.M.D., Murni, N. G. N. S., & Mecha, I. P. S. (2021). *The community-based tourism at The Tourist Village in the Local People's Perspective*. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 38(4), pp. 977–996. <https://doi.org/10.30892/gtg.38401-735>
- Rochaeni A, Yamardi, Noer Apptika Fujilestari. *Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat*. *NeoRespublica J Ilmu Pemerintah*. 2022;4(1):124-134. doi:10.52423/neores. V4i1.38
- Slamet R, Nainggolan B, Roessobiyatno R, Ramdani H, Hendriyanto A, Ilma LL. *Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*. *J Manaj Indones*. 2017;16(2):136. doi:10.25124/jmi. V16i2.319
- Tamianingsih T, Eprilianto DF. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Community Based Tourism (Studi Kasus Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)*. *Publika*. Published online 2022:1025-1040. doi:10.26740/publika. v10n3. P1025-1040
- Ubaya.ac.id. *Ubaya Bangkitkan Potensi Wisata Gempong Desa Ketapanrame Mojokerto*. <https://www.ubaya.ac.id/2021/12/30/ubaya-bangkitkan-potensi-wisata-gempong-desa-ketapanrame-mojokerto/>
- Vani RV, Priscilia SO, Adiarto A. *Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru*. *Publikauma J Adm Publik Univ Medan Area*. 2020;8(1):63-70. doi:10.31289/publika. V8i1.3361
- Wahyuni, D. (2018). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Nglanggeran, KabupatenGunungkidul*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83–100.